



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NANI YUSLINA
2. Jabatan : LURAH
3. NHK : 861494

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/40 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	35.540.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.235.540.000
III. HUTANG	Rp.	400.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.835.540.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HUDIYANTO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS KELURAHAN**
3. NHK : **846434**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 165.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 271.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI MOBIL PENUMPANG JEEP S.C. HDTP
Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 271.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ---**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 30.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ---**

Sub Total **Rp. 466.000.000**

III. HUTANG **Rp. 38.978.536**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 427.021.464**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KRISTIAN GOTTAM MARUDUT SIHOMBING**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**
3. NHK : **1001261**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 564 m2/564 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 12.134 m2/12.134 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 51.200 m2/51.200 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m2/193 m2 di KAB / KOTA KOTA BITUNG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1.365 m2/1.365 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 39 m2/78 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 216.000.000

1. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOBIL, KIA PICANTO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000



3. MOTOR, POLITRON FOX R Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.326.000.000
III. HUTANG	Rp.	1.556.578.694
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.769.421.306

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EUIS MULYANI**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**
3. NHK : **775757**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/78 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	89.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AGYA 1000 CC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 89.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	10.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.797.332
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	910.547.332

III. HUTANG **Rp.** **486.240.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **424.307.332**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI CATUR SETYOWATI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK : 224159

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 195.264.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/54 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 195.264.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 164.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 140.000.000
3. MOTOR, YAMAHA B6H A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
19.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 89.170.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 724.124.532

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.173.058.532

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.173.058.532

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KELURAHAN PINANG RANTI
REKAPITULASI PENYAMPAIAN LHKPN TAHUN PELAPORAN 2025
Status Laporan : 3 September 2026

No	Unit Kerja	Wajib Lapor LHKPN	Sudah Lapor LHKPN		Belum Lapor LHKPN	
1	Kelurahan Pinang Ranti	5	5	100%	-	-

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Jumlah Laporan	NHK	Tahun WL	Status Pelaporan	Tanggal Kirim	Tanggal Lapor
1	Nani Yuslima	Lurah	Kelurahan Pinang Ranti	1	861494	2025	Sudah Lapor	26 Februari 2026	31 Desember 2025
2	Hudiyanto	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan Pinang Ranti	1	846434	2025	Sudah Lapor	23 Februari 2026	31 Desember 2025
3	Kristian Gottam M Sihombing	Kasi Pemerintahan	Kelurahan Pinang Ranti	1	1001261	2025	Sudah Lapor	31 Maret 2026	31 Desember 2025
4	Euis Mulyani	Kasi Ekonomi, Pembangunan	Kelurahan Pinang Ranti	1	775757	2025	Sudah Lapor	9 Maret 2026	31 Desember 2025
5	Sri Catur Setyowati	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Kelurahan Pinang Ranti	1	224159	2025	Sudah Lapor	8 Maret 2026	31 Desember 2025